

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SKPD/OPD KECAMATAN ALIAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD/OPD Kecamatan Alian disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada SKPD/OPD Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 94 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kebumen;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
26. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 900/3677 tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2022.

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	2.1	Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab III	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan SKPD	
	3.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD :
		3.1.1 LRA
		3.1.2 L O
		3.1.3 Neraca
		3.1.4 LPE
		3.1.5 CALK
	3.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas yang menggunakan basis akrual.
Bab IV	Penjelasan dan informasi-informasi non keuangan	
Bab V	Penutup	

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2022 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai sebesar Rp 0,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp 0,00 dan mengalami penurunan sebesar 0%. Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2021 (audited) (Rp)
1	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	0	0	0	0	0

2. Belanja

Realisasi Belanja TA 2022 sebesar Rp 2.071.373.924,00 dari anggaran sebesar Rp 2.177.123.000,00 atau mencapai 95,14%. Dan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp 1.865.761.444,00 realisasinya mengalami penurunan sebesar 0,81%.

Realisasi Belanja Per Akun

Rincian realisasi belanja per akun disajikan sebagai berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN T.A. 2022	REALISASI T.A. 2022	PROSENTASE %
B. BELANJA			
Belanja Operasi			
1. Belanja Pegawai	1.771.603.000	1.681.236.632	94,90
2. Belanja Barang dan Jasa	404.383.000	389.037.292	96,21
3. Belanja Hibah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Operasi	2.175.986.000	2.070.273.924	95,14
Belanja Modal			
1. Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.137.000	1.100.000	96,75
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Modal	1.137.000	1.100.000	95,75
JUMLAH BELANJA	2.177.123.000	2.071.373.924	95,14

B. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum beberapa hambatan atau kendala yang ada dalam pencapaian Target Realisasi Keuangan SKPD Kecamatan Alian Tahun Anggaran 2022 yang tidak optimal antara lain :

1. Dalam pelaksanaan kegiatan DPA APBD Tahun Anggaran 2022 kurang mematuhi jadwal kegiatan;
2. Realisasi belanja menyesuaikan dengan kebutuhan pada beberapa kegiatan;
3. Beberapa belanja seperti belanja listrik, air dan telepon dalam perencanaannya hanya dapat diprediksikan dan tidak dapat dipastikan besaran kebutuhan yang diperlukan;
4. Belanja modal melalui e-katalog pada Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
5. Dengan adanya pembatasan kegiatan rapat-rapat koordinasi karena pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap efisiensi dukungan anggaran konsultasi dan koordinasi.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran

1.1. Pendapatan - LRA

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan OPD Kecamatan Alian Tahun Anggaran 2022 adalah :

Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	*)Realisasi 2021 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	0	0	0	0	0

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah	2022		%	Realisasi 2021 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Pajak Daerah	0	0	0	0
Retribusi Daerah	0	0	0	0
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0	0	0	0
Jumlah	0	0	0	0

1.2. Belanja - LRA

Realisasi belanja OPD Kecamatan Alian Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 2.071.373.924,00 atau 95,14% dari anggaran sebesar Rp 2.177.123.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 tersaji sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2022

URAIAN	2022		%	Realisasi 2021 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
BELANJA				
Belanja Operasi				
1. Belanja Pegawai	1.771.603.000	1.681.236.632	94,90	1.438.669.874
2. Belanja Barang dan Jasa	404.383.000	389.037.292	96,21	364.778.952
3. Belanja Hibah	0	0	0,00	0
4. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00	0
Jumlah Belanja Operasi	2.175.986.000	2.070.273.924	95,14	1.803.448.826
Belanja Modal				
1. Belanja Modal Tanah	0	0	0,00	0
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.137.000	1.100.000	96,75	62.312.618
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
4. Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan	0	0	0,00	0
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00	0
6. Belanja Modal Aset Tak Berwujud	0	0	0,00	0
Jumlah Belanja Modal	1.137.000	1.100.000	96,75	62.312.618
JUMLAH BELANJA	2.177.123.000	2.071.373.924	95,14	1.865.761.444

Berdasarkan Tabel diatas Perbandingan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 dengan Tahun Anggaran 2021 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA 2022 mengalami penurunan sebesar 0,81%. Dengan rincian Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar 0,83% dan Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 1,41%.

a) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi sebesar Rp 2.070.273.924,00 mencapai 95,17% dari anggaran sebesar Rp 2.175.123.000,00 apabila dibandingkan dengan realisasi 2021 yang sebesar Rp 1.803.448.826,00 mengalami penurunan sebesar 0,88%.

Belanja operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Adapun rincian realisasi atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang Jasa Tahun Anggaran 2022 dan 2021 tersaji sebagai berikut :

Belanja Operasi	2022		%	Realisasi 2021 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1. Belanja Pegawai				
a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.037.759.000	1.021.971.774	98,47	928.696.605
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	712.472.000	639.019.858	89,69	487.829.669
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	21.372.000	20.245.000	94,72	23.665.000
2. Belanja Barang dan Jasa				
a. Belanja Barang Pakai Habis Kantor	259.104.000	259.017.800	99,96	217.728.685
b. Belanja Barang Tak Habis Pakai	255.000	251.100	98,47	3.097.000
c. Belanja Jasa Kantor	98.505.000	83.619.392	84,88	83.883.267
d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	3.679.000	3.679.000	100	570.000
e. Belanja Pemeliharaan	16.800.000	16.430.000	97,79	24.000.000
f. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.040.000	26.040.000	100	35.500.000
Total Belanja Operasi	2.175.123.000	2.070.273.924	95,17	1.804.970.226

Belanja Hibah sebesar Rp 0,00, sedangkan Belanja Bantuan Sosial juga sebesar Rp 0,00.

b) Belanja Modal

Realisasi belanja modal sebesar Rp 1.100.000,00 mencapai 96,75% dari anggaran sebesar Rp 1.137.000,00 apabila dibandingkan dengan realisasi 2021 yang sebesar Rp 62.312.618,00 mengalami kenaikan sebesar 1,41%.

Adapun rincian realisasi atas Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 dan 2021 tersaji sebagai berikut :

Belanja Modal	2022		%	Realisasi 2021 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Tanah	0	0	0,00	0
Belanja Peralatan dan Mesin	1.137.000	1.100.000	96,75	62.312.618
Belanja Gedung dan Bangunan	0	0	0,00	0
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00	0
Belanja Aset tetap Lainnya	0	0	0,00	0
Belanja Aset Tak Berwujud	0	0	0,00	0
Jumlah	1.137.000	1.100.000	96,75	62.312.618

2. Laporan Operasional

2.1. Pendapatan - LO

Pendapatan - LO OPD Kecamatan Alian adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Pendapatan – LO

No	Pendapatan – LO	2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Audited) (Rp)
1	PAD – LO	0	0
2	Transfer – LO	0	0
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO	0	0
Jumlah		0	0

2.2. Beban - LO

Realisasi Beban OPD Kecamatan Alian pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 2.076.352.909,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban TA 2022 dan 2021

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2021	Kenaikan/ Penurunan (%)
BEBAN			
Beban Operasi	2.076.352.909	1.919.218.981	8,19
Beban Transfer	0	0	0
Beban Luar Biasa	0	0	0
Total Beban	2.076.352.909	1.919.218.981	8,19

a) Beban Operasi

Beban Operasi Tahun 2022 sebesar Rp 2.076.352.909,00 terdiri dari :

Realisasi Beban Operasi

No	Beban	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Pegawai	1.688.229.306	1.452.487.594	16,23
2	Beban Persediaan	258.213.900	220.854.385	16,92
3	Beban Jasa	87.439.703	84.290.726	3,74
4	Beban Pemeliharaan	16.430.000	24.000.000	(31,54)
5	Beban Perjalanan Dinas	26.040.000	35.500.000	(26,65)
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	102.086.276	(100,00)
Jumlah		2.076.352.909	1.919.218.981	8,19

Dari tabel diatas dapat diketahui Beban Operasi LO Tahun 2022 naik sebesar Rp 157.133.928,00 atau sebesar 8,19% dibandingkan tahun sebelumnya.

1. Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 1.688.229.306,00.

2. Beban Barang dan Jasa

Realisasi Beban Barang Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 388.123.603,00.

3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi pada OPD Kecamatan Alian TA 2022 sebesar Rp 0,00

b) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan piutang OPD Kecamatan Alian Tahun 2022 adalah sebesar Rp 0,00

Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	Jenis Beban	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	0	0
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0	0
	Jumlah	0	0

c) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 sebesar Rp 0,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp 102.086.276,00 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

NO	Jenis Beban	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	84.778.866
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	17.037.410
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	270.000
4.	Beban Penyusutan Aset lainnya	0	0
5.	Beban Amortisasi Aset Tdak Berwujud	0	0
	Jumlah	0	102.086.276

d) Surplus/defisit - LO

Surplus defisit - LO untuk Tahun 2022 sebesar (Rp 2.076.352.909,00) atau turun sebesar 92,43% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp 1.919.218.981,00).

3. Neraca

3.1. Aset

a) Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 1.145.600,00 dan Rp 90.600,00. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada OPD Kecamatan Alian per 31 Desember 2022 disajikan pada tabel berikut :

Tabel Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2022 dan 2021

No.	Aset Lancar	TA 2022	TA 2021
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	0.00	0.00
4	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
5	Piutang Pendapatan	0.00	0.00
6	Piutang Lainnya	0.00	0.00
7	Penyisihan Piutang	0.00	0.00
8	Beban dibayar di muka	0.00	0.00
9	Persediaan	1.145.600,00	90.600,00
	Jumlah	1.145.600,00	90.600,00

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Saldo ini merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TU/Pajak per tanggal neraca.

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar masing-masing Rp 0,00 dan Rp 0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa pelayanan dan pendapatan lain yang sah.

3. Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00 disajikan bruto sebelum dikurangi penyisihan piutang yang disajikan terpisah pada akun Penyisihan Piutang. Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

4. Penyisihan piutang pendapatan

Merupakan estimasi atas jumlah piutang pendapatan yang diperkirakan tak tertagih berdasarkan metode berdasarkan penghitungan penyisihan menurut umur piutang (aging schedule). Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sesuai jenisnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Kebumen. Saldo penyisihan piutang pendapatan per 31 Desember 2022 adalah nol/nihil.

5. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp 1.145.600,00 dan Rp 90.600,00

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun saldo persediaan sebesar Rp 1.145.600,00 merupakan saldo persediaan atas belanja yang belum habis/belum digunakan sampai dengan tanggal neraca.

No	Persediaan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Audited) (Rp)
1.	Barang Pakai Habis Kantor	1.145.600	90.600
2.	Bahan/Material	0	0
3.	Barang Lainnya	0	0
Jumlah		1.145.600	90.600

b) Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 tersaji sebesar Rp 1.024.844.216,00 dan Rp 1.023.744.216,00. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap OPD Kecamatan Alian per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut :

Rincian Aset Tetap

No	Jenis	T.A. 2022	T.A. 2021
1	Tanah	61.890.400,00	61.890.400,00
2	Peralatan dan Mesin	1.000.224.535,00	999.124.535,00
3	Gedung dan Bangunan	847.132.000,00	847.132.000,00
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	10.800.000,00	10.800.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(895.202.719,00)	(895.202.719,00)
Jumlah		1.024.844.216,00	1.023.744.216,00

1. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki OPD Kecamatan Alian per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 61.890.400,00 dan Rp 61.890.400,00

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	61.890.400,00
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Mutasi dari SKPD lain	Rp	-
Koreksi tambah Aset		
Total Tambah		
Mutasi kurang:	Rp	-
Mutasi ke SKPD lain	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Total kurang		
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	61.890.400,00

Tanah yang tercatat di Neraca OPD Kecamatan Alian terdiri dari :

No	Uraian	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Tanah OPD	Rp 61.890.400	Rp -	Rp -	Rp 61.890.400
2	Tanah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	Tanah	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp 61.890.400	Rp -	Rp -	Rp 61.890.400

Adapun Tanah OPD senilai Rp 61.890.400,00 terletak pada :

No	Lokasi	Kecamatan	Tahun	Luas (m2)	Nilai Perolehan
1	Desa Krakal	Alian	1945	8656 m2	61.890.400,00
2	20.... m2
3	20.... m2
	Jumlah				61.890.400,00

2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 1.000.224.535,00 dan Rp 999.124.535,00

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	999.124.535,00
Mutasi tambah:		
Belanja Modal	Rp	1.100.000,00
Mutasi dari SKPD lain	Rp	-
Reklas/koreksi tambah Aset	Rp	-
Total tambah	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghapusan	Rp	-
Rusak Berat	Rp	-
Mutasi ke SKPD lain	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Reklas (dari BM Intra ke Ekstra)	Rp	-
Total kurang	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	1.000.224.535,00

Adapun mutasi tambah sebesar Rp 1.100.000,00 merupakan belanja modal pada tahun 2022 (detail terlampir).

No	Nama Peralatan	Tahun Perolehan	Volume	Satuan	Harga Perolehan	Ket.
1	Kursi Tunggu Deret 3	2022	1	unit	1.100.000	
Jumlah					1.100.000	

Jumlah akhir aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp 1.000.224.535,00 sebagaimana mutasi berikut :

No	Lokasi Peralatan	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Kecamatan Alian	999.124.535	1.100.000	-	1.000.224.535
2					
3					
Jumlah		999.124.535	1.100.000	-	1.000.224.535

3. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 847.132.000,00 dan Rp 847.132.000,00

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	847.132.000,00
Mutasi tambah:		
Belanja Barang Jasa menjadi Aset	Rp	-
Mutasi dari SKPD lain	Rp	-
Koreksi / Reklas tambah Aset	Rp	-
Total Tambah	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghapusan Aset	Rp	-
Rusak Berat	Rp	-
Mutasi ke SKPD Lain	Rp	-
Reklas Aset (dari BM Intra ke Ekstra)	Rp	-
Total Kurang	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	847.132.000,00

Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp 847.132.000,00 terdiri dari :

No	Uraian Gedung dan Bangunan	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Bangunan Gedung	Rp 847.132.000	Rp -	Rp -	Rp 847.132.000
2					Rp -
3					Rp -
	Jumlah	Rp 847.132.000	Rp -	Rp -	Rp 847.132.000

Belanja Barang Jasa menjadi Aset sebesar Rp 0,00 merupakan belanja Barang Jasa menjadi Aset OPD Kecamatan Alian pada Tahun 2022 (rekap terlampir).

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 10.800.000,00 dan Rp 10.800.000,00

Saldo per 31 Desember 2020	Rp 10.800.000,00
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	Rp -
Mutasi dari SKPD LAin	Rp -
Koreksi Tambah/reklas aset	Rp -
Total Tambah	Rp -
Mutasi kurang:	
Penghapusa Aset	Rp -
Rusak Berat	Rp -
Mutasi ke SKPD Lain	Rp -
Koreksi/reklas aset	Rp -
Total Kurang	Rp -
Saldo per 31 Desember 2021	Rp 10.800.000,00

Nilai Aset Jaringan sebesar Rp 10.800.000,00 merupakan Jaringan yang dimiliki OPD Kecamatan Alian.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00

Saldo per 31 Desember 2021	Rp -
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	Rp -
Mutasi ke SKPD Lain	Rp -
Koreksi Tambah /reklas aset	Rp -
Total Tambah	Rp -
Mutasi kurang:	
Penghapusan Aset	Rp -
Rusak Berat	Rp -
Mutasi ke SKPD	Rp -
Koreksi/reklas aset	Rp -
Total Kurang	Rp -
Saldo per 31 Desember 2022	Rp -

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	-
Mutasi tambah:		
Koreksi	Rp	-
Pembelian	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penyelesaian KPD	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	-

7. Akumulasi Penyusutan Aset

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada OPD Kecamatan Alian TA 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp 895.202.719,00) dan (Rp 895.202.719,00) OPD Kecamatan Alian Tahun 2022 merupakan tahun ke-6 melakukan pelaporan keuangan dari kas basis ke accrual basis, sehingga Tahun 2022 merupakan tahun ke-6 dalam melakukan penyusutan.

c) Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dalam hal OPD Kecamatan Alian sebagai SKPD, tidak ada Dana Cadangan pada OPD Kecamatan Alian untuk Tahun 2022.

d) Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

1. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	-
Mutasi tambah:		
Pembelian Software	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	-

2. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00 Nilai Aset Lain-lain merupakan Aset Tetap yang kondisinya rusak berat. Adapun rincian aset lain-lain sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	-
Mutasi tambah:		
Belanja Modal	Rp	-
Mutasi dari SKPD Lain	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Reklas	Rp	-
Total Tambah	Rp	-

Mutasi kurang:	
Penghapusan Aset	Rp -
Rusak Berat	Rp -
Mutasi ke SKPD lain	Rp -
Koreksi	Rp -
Total Kurang	Rp -
Saldo per 31 Desember 2022	Rp -

3.2. Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 dan 2021 tersaji sebesar Rp 2.128.137.572,00 dan Rp 49.629.663,00

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0	0
2	Pendapatan diterima Dimuka	0	0
3	Utang Belanja	56.763.648	49.629.663
4	R/K PPKD	2.071.373.924	0
Jumlah		2.128.137.572	49.629.663

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar merupakan potongan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara per 31 Desember 2022.

b) Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima oleh Pemerintah Daerah namun belum sepenuhnya merupakan hak Pemerintah Daerah, karena menyangkut pendapatan atas periode berikutnya, yang posisi per 31 Desember 2022 diterima SKPD sebagai berikut :

No.	OPD	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	-	-	Pendapatan diterima dimuka atas.....
2.			
3.			
Jumlah			

3.3. Ekuitas

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 974.205.153,00 dan Rp 974.205.153,00.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	974.205.153,00	1.027.603.490,00
SURPLUS/DEVISIT-LO	(2.076.352.909,00)	(1.919.218.981,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR :		
Koreksi Ekuitas	0,00	59.200,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	2.071.373.924,00	1.865.761.444,00
EKUITAS AKHIR	969.226.168,00	974.205.153,00

4.1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal Tahun 2022 sebesar Rp 974.205.153,00 merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana Tahun 2021.

4.2. Surplus/Devisit-LO

Surplus/Devisit-LO Tahun 2022 adalah Rp (2.076.352.909,00)

4.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Koreksi Ekuitas adalah Rp 0,00

4.4. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan Tahun 2022 adalah Rp 2.071.373.924,00.

4.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Tahun 2022 adalah Rp 969.226.168,00.

B. Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas yang Menggunakan Basis Akrual.

BAB IV
PENJELASAN DAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

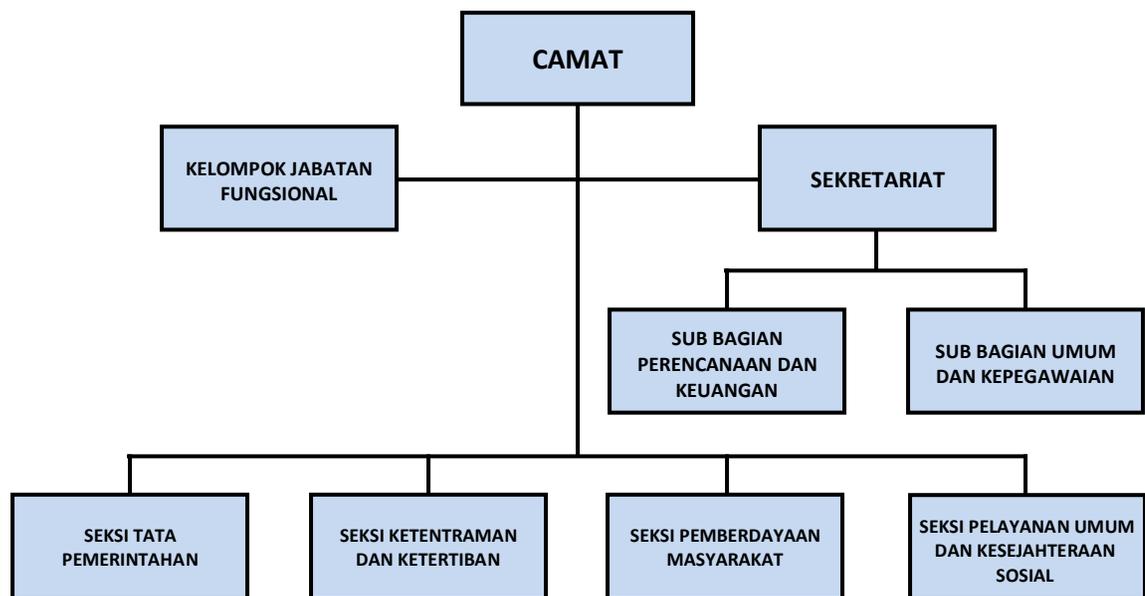
A. Penjelasan Umum

1. Susunan Organisasi

a. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretariat; membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Bagan Organisasi Kecamatan :



2. Kedudukan dan Tugas Pokok

a. Kedudukan

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
2. Kecamatan dipimpin oleh Camat.
3. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

1. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, meliputi :
 - a) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f) membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; dan
 - g) melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

3. Siklus Anggaran Daerah

Siklus Anggaran Daerah meliputi Penyusunan APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

4. Prinsip Pelaksanaan APBD

Prinsip dalam pelaksanaan APBD yang perlu diperhatikan, antara lain :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- c. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD.
- d. Untuk pengeluaran atas beban APBD, terlebih dahulu diterbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) oleh PPKD selaku BUD atau Surat Keputusan Bupati Kebumen lainnya yang disamakan dengan SPD.
- e. Semua Penerimaan dan Pengeluaran Daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilaksanakan melalui rekening Kas Umum Daerah yang ditempatkan pada PT. Bank Jateng.
- f. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan atau Pengeluaran dan orang atau Badan yang menerima atau menguasai uang atau barang atau kekayaan Daerah wajib menyelenggarakan Penatausahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- g. Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Surat Bukti yang menjadi dasar Penerimaan dan atau Pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- h. SKPD/OPD penghasil dilarang menggunakan secara langsung penerimaannya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran, karena penerimaan SKPD/OPD adalah Pendapatan Daerah, dan seluruh penerimaan daerah harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Jateng, paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak uang kas diterima.
- i. SKPD/OPD penghasil pendapatan daerah secara periodik (setiap bulan) memberikan laporan target dan realisasi pendapatan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
- j. Uang milik daerah dikelola oleh Kantor Kas Daerah, yang menurut perhitungan dalam kurun waktu tertentu belum digunakan dapat didepositokan, sepanjang tidak mengganggu Likuiditas Keuangan Daerah dengan persetujuan Bupati. Setiap mutasi deposito diberitahukan kepada Biro Keuangan.
- k. Bunga deposito dan jasa giro atas penempatan uang daerah di bank merupakan pendapatan daerah, sehingga harus langsung disetor ke rekening Kas Umum Daerah.
- l. Bendahara Penerimaan dilarang, baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan atau pekerjaan atau penjualan tersebut.
- m. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ataupun Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Penerimaan juga tidak diperbolehkan membuka rekening dengan atas nama pribadi pada Bank atau Giro Pos dengan tujuan pelaksanaan APBD.
- n. Bendahara Penerimaan tidak diperbolehkan menyimpan uang, cek atau surat berharga lebih dari 1 (satu) hari kerja.
- o. Pada SKPD/OPD yang mengelola penerimaan daerah hanya terdapat 1 (satu) orang Bendahara Penerimaan.

- p. Pada SKPD/OPD hanya terdapat 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran.
- q. Kegiatan yang terdiri dari sub-sub kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT/Balai dapat ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, PPTK dan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- r. Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara Pengeluaran Pembantu hanya dapat ditunjuk ditingkat Kuasa Pengguna Anggaran.

B. Informasi Umum Tentang Entitas

Berisi domisili dan bentuk hukum suatu entitas, kegiatan operasional serta ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional.

1. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

2. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam penetapan entitas pelaporan perlu mempertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

BAB V PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan SKPD/OPD Kecamatan Alian Tahun Anggaran 2022 dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan yang harus dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari penggunaan dana APBD, serta sebagai perwujudan akuntabilitas SKPD sebagai sebuah entitas akuntansi/pelaporan.

Kebumen, 31 Desember 2022

PENGGUNA ANGGARAN



SAMPURNNO, S.Sos, M.M.

NIP. 196601051986031012